Aneksasi Krimea Memicu Perang Rusia - Ukraina

Oleh: Yappi Manafe
Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana 1982

Pengantar

Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan bahwa dirinya bersama sekelompok kecil pejabat tinggi Rusia secara spontan memutuskan untuk menginvasi Krimea setelah Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych (Presiden Ukraina pada masa itu), meninggalkan jabatannya pada 22 Februari 2014. Sebaliknya, para pengkritik Rusia serta pihak-pihak yang memandang peristiwa tersebut melalui perspektif *"Perang Dingin"* berpendapat bahwa invasi Rusia ke Krimea merupakan manifestasi dari kebijakan ekspansionis Rusia yang bersifat inheren, bahkan mungkin telah lama direncanakan oleh kepemimpinan Rusia. Sejumlah pengamat Barat, termasuk para pakar kebijakan luar negeri, menyatakan bahwa kepemimpinan Rusia pada dasarnya terdorong atau bahkan terpaksa mengambil alih Krimea—dan berpotensi memperluas keterlibatannya ke Ukraina—sebagai respons terhadap tindakan agresif Barat serta perluasan pengaruh Barat ke kawasan penyangga *("buffer zone")* di sekitar Rusia.

Rusia menginvasi Semenanjung Krimea di Ukraina pada Februari dan Maret 2014, melalui Operasi Militer terselubung, dimulai secara resmi pada 20 Februari 2014**,** dan pencaplokan wilayah tersebut disahkan melalui Referendum (yang dikecam dunia internasional) sebelum Rusia secara resmi memasukkan Krimea sebagai bagian dari Federasi Rusia (pada masa itu) pada 18 Maret 2014.

Selama delapan tahun, sejak 2014 hingga 2022, Ukraina mengalami kerugian yang sangat besar akibat konflik di wilayah timur negara tersebut. Konflik ini telah menyebabkan lebih dari 14.000 korban jiwa berkaitan dengan perang, serta memaksa sekitar 1,5 juta penduduk mengungsi dari tempat tinggal mereka. Ketika melancarkan invasi berskala penuh pada tahun 2022, Rusia menghadapi kondisi Ukraina yang jauh berbeda dibandingkan pada awal konflik tahun 2014. Selama hampir satu dekade konflik berlangsung, Ukraina telah berhasil meningkatkan kemampuan militernya sekaligus memperkuat jaringan masyarakat sipil yang luas dan terorganisasi dengan baik.

Meskipun secara relatif Ukraina masih berada di bawah Rusia dalam berbagai indikator kekuatan nasional—baik dari sisi produk domestik bruto (PDB) sebesar 536 miliar dolar AS dibandingkan 4,08 triliun dolar AS milik Rusia, jumlah penduduk sekitar 43 juta dibandingkan 142 juta jiwa, maupun kapabilitas militer yang mencakup 500.000 dibandingkan 1.330.900 personel militer, 312 dibandingkan 4.182 pesawat udara, 1.890 dibandingkan 12.566 tank, serta tidak memiliki hulu ledak nuklir dibandingkan dengan 5.977 hulu ledak nuklir milik Rusia—Ukraina telah menunjukkan kesiapan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan wilayahnya.

Pada puncak invasi Maret 2022, Rusia berhasil menguasai sekitar 22% wilayah Ukraina. Hingga saat ini, Rusia masih mengendalikan sekitar 17% wilayah Ukraina, meningkat dari sekitar 7% wilayah yang sebelumnya telah dikuasai oleh Rusia dan kelompok separatis yang didukung Rusia sebelum dimulainya invasi skala penuh. Namun demikian, ibu kota Kyiv tetap berada di bawah kendali pemerintah Ukraina, dan secara keseluruhan Ukraina menunjukkan tingkat persatuan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghadapi agresi Rusia.

Pada 17 Juni 2026, para pemimpin negara-negara G7 yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Prancis menyatakan komitmen mereka untuk memperkuat sistem pertahanan udara Ukraina serta meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Rusia yang mendukung upaya perang. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui pengetatan sanksi, khususnya terhadap sektor minyak dan gas Rusia. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah KTT, para pemimpin G7 menegaskan bahwa mereka *"**bersatu dalam memberikan dukungan yang tidak tergoyahkan kepada Ukraina dalam mempertahankan kebebasan, kedaulatan, dan integritas wilayahnya.**"* Pernyataan tersebut mencerminkan keberlanjutan komitmen negara-negara G7 untuk mendukung Ukraina, sekaligus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia sebagai bagian dari respons internasional atas konflik yang masih terus berlangsung.

Historikal, Geografi Semenanjung Krimea

Semenanjung Krimea terletak di sebelah selatan daratan utama Ukraina dan terhubung dengan Ukraina melalui Tanah Genting Perekop (Isthmus of Perekop) yang sempit, dengan lebar hanya sekitar 5–6 kilometer. Di sebelah timur, Krimea berbatasan dengan wilayah Kuban di Rusia, yang dipisahkan oleh Selat Kerch (Strait of Kerch) yang juga relatif sempit, lebar sekitar 3–14 kilometer. Menjorok ke Laut Hitam, semenanjung ini—terutama pelabuhan utamanya, Sevastopol—telah memainkan peranan maritim yang sangat penting dalam jalur perdagangan kawasan tersebut selama berabad-abad.

Secara historis, Krimea merupakan wilayah yang kerap menjadi pusat konflik dan perebutan pengaruh di antara berbagai bangsa, termasuk Kimmeria (Cimmerians), Skithia (Scythians), Yunani, Romawi, Goth, Hun, Bulgar, Khazar, Mongol, Kekhanan Horde Emas (Golden Horde), serta republik-republik Venesia dan Genoa. Selama berabad-abad, Semenanjung Krimea diperebutkan oleh berbagai kekaisaran, antara lain Kekaisaran Bizantium, Kievan Rus, dan Khazaria pada abad ke-9 hingga ke-10; Muscovy dan Kekhanan Krimea (Crimean Khanate) pada abad ke-15 hingga ke-18; serta Kekaisaran Rusia dan Kesultanan Utsmaniyah, bersama Britania Raya dan Prancis, dalam Perang Krimea (Crimean War) yang berlangsung pada tahun 1853–1855. Sejak tahun 1783, ketika Rusia memperoleh kendali atas Semenanjung Krimea, Armada Laut Hitam Rusia (Russian Black Sea Fleet) bermarkas di Sevastopol.

Pada masa Uni Soviet maupun periode pasca-Uni Soviet, berbagai isu strategis lainnya, termasuk akses terhadap jaringan pipa gas, terus menjadikan Krimea sebagai kawasan yang sarat dengan konflik dan persaingan geopolitik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sumber dari Rusia mengemukakan adanya cadangan hidrokarbon dalam jumlah yang signifikan di landas kontinen Laut Hitam, khususnya di wilayah pesisir yang mengelilingi Krimea.

Dalam mitologi politik dan imajinasi masyarakat Rusia, Krimea kerap dipandang sebagai sebuah *"hadiah"* (*"gift"*) dalam dua peristiwa penting. Pertama, pada tahun 1783, Grigory Potemkin, negarawan terkemuka pada masa pemerintahan Catherine Agung *("Catherine the Great")*, mempersembahkan Krimea kepada sang permaisuri dengan menyebutnya sebagai *"Surga Rusia" ("Russia's Paradise")*. Kedua, pada tahun 1954, Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev *"menghadiahkan"* Krimea kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina *("Ukrainian Soviet Socialist Republic")*. Kebijakan tersebut diduga bertujuan untuk memperoleh dukungan politik dari Ukraina dalam memperkuat posisi Khrushchev sebagai pemimpin paling berpengaruh setelah wafatnya Joseph Stalin, sekaligus membangun dukungan politik di kawasan tersebut, yang telah mengalami pergolakan selama bertahun-tahun. Wilayah tersebut juga telah mengalami pergolakan akibat perang saudara yang menyertai aneksasi wilayah-wilayah paling barat pada akhir Perang Dunia II. Perubahan batas-batas administratif internal merupakan praktik yang lazim dilakukan di Uni Soviet. Wilayah-wilayah baru secara berkala dibentuk, dialihkan ke Republik yang berbeda, serta mengalami perubahan status administratif menjadi Republik Otonom (*"autonomous republics"*) atau wilayah administratif (*"oblasts"*), sesuai dengan kebutuhan politik dan pemerintahan pada masa itu. Dalam konteks tersebut, perpindahan Semenanjung Krimea dari satu Republik Soviet ke Republik Soviet lainnya tidak memperoleh perhatian yang berarti, karena seluruh Republik tersebut masih berada dalam kerangka negara Uni Soviet. Persoalan mengenai status Krimea baru menjadi isu politik dan hukum yang penting setelah Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991, ketika batas-batas administratif internal berubah menjadi batas-batas internasional yang memisahkan negara-negara merdeka yang baru terbentuk.

Komposisi penduduk Krimea juga secara historis diwarnai oleh dinamika yang melibatkan konflik sekaligus praktik pemberian wilayah sebagai bentuk patronase politik. Sejak abad ke-14 hingga abad ke-18, Tatar Krimea merupakan kelompok etnis yang dominan dan memerintah wilayahnya sendiri. Ketika Pangeran Grigory Potemkin memutuskan untuk mencaplok Semenanjung Krimea dengan membatalkan Perjanjian Küçük Kaynarca (*"Treaty of Küçük Kaynarca"*) tahun 1774, ia mulai membagikan tanah-tanah tersebut—beserta para petani penggarap yang terikat pada tanah (*"serfs"*)—kepada kalangan bangsawan Rusia. Praktik ini kemudian memiliki kemiripan dengan kebijakan pemerintah Uni Soviet pada masa berikutnya melalui pemindahan warga negara Rusia ke berbagai wilayah yang sebelumnya didominasi oleh penduduk non-Rusia.

Provinsi baru yang dibentuk Potemkin, yang dikenal sebagai Provinsi Tauride *("Tauride Province")*, menjadi bagian dari wilayah selatan Kekaisaran Rusia yang oleh Catherine Agung (Catherine the Great) dinamai Novorossiya (New Russia atau Rusia Baru). Berdasarkan sensus terakhir pada masa Kekaisaran Rusia tahun 1897, Tatar Krimea masih merupakan kelompok etnis terbesar, meskipun hanya dengan keunggulan tipis, yakni sekitar 35 persen dari total populasi. Sementara itu, etnis Rusia mencakup sekitar 33 persen, etnis Ukraina 11 persen, dan masyarakat Yahudi sekitar 4 persen. Namun, komposisi demografis tersebut kemudian mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring dengan kebijakan pemerintah Uni Soviet yang mendatangkan lebih banyak penduduk etnis Rusia ke wilayah Krimea.

Perubahan paling drastis terjadi selama Perang Dunia II, ketika pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, mendeportasi seluruh penduduk Tatar Krimea dengan alasan bahwa mereka diduga bekerja sama dengan rezim pendudukan Nazi. Kebijakan deportasi tersebut mengubah struktur demografi Krimea secara fundamental. Sensus tahun 1926 mencatat bahwa penduduk Krimea terdiri atas sekitar 42 persen etnis Rusia, 25 persen Tatar Krimea, dan 10 persen etnis Ukraina. Pada sensus tahun 1939, proporsi tersebut berubah menjadi hampir 50 persen etnis Rusia, 19 persen Tatar Krimea, dan 14 persen etnis Ukraina. Selanjutnya, pada sensus tahun 1959, tidak terdapat lagi penduduk Tatar Krimea yang tercatat sebagai akibat dari kebijakan deportasi massal tersebut. Berdasarkan sensus nasional Ukraina tahun 2001, komposisi penduduk Krimea menunjukkan bahwa etnis Rusia merupakan mayoritas dengan sekitar 60 persen dari total populasi, diikuti oleh etnis Ukraina sebesar 24 persen dan Tatar Krimea sekitar 10 persen. Dengan demikian, "hadiah" Krimea kepada Kekaisaran Rusia, dan kemudian dalam kerangka Kekaisaran Soviet, pada akhirnya justru menjadi sebuah kehilangan yang sangat besar bagi masyarakat Tatar Krimea, baik dari segi demografis, politik, maupun historis.

Baik para pemimpin Kekaisaran Rusia maupun Uni Soviet kemudian membangun berbagai istana di Krimea, termasuk Istana Livadia (Livadia Palace) yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Yalta (Yalta Conference) pada tahun 1945. Konferensi Yalta diselenggarakan di Istana Livadia pada tahun 1945. Selain itu, berbagai film yang diproduksi pada era Uni Soviet maupun pasca-Uni Soviet sering menggambarkan Krimea sebagai kawasan yang identik dengan kehangatan iklim dan destinasi wisata, sekaligus sebagai simbol peperangan dan kepahlawanan. Krimea juga merupakan lokasi sejumlah resort terkenal yang berkembang pada masa Uni Soviet, seperti Yalta, Koktebel, Bakhchisarai, dan Feodosia. Dengan demikian, dalam mitologi politik dan budaya Uni Soviet maupun pasca-Uni Soviet, Krimea menempati posisi yang istimewa sebagai wilayah yang melambangkan perjuangan dan kepahlawanan—baik dalam Perang Krimea maupun Perang Dunia II—serta sebagai tempat rekreasi yang merepresentasikan *"kehidupan yang sejahtera"* (*"the good life"*). Citra tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Krimea yang merupakan salah satu kawasan beriklim paling hangat di bagian Eropa bekas wilayah Uni Soviet.

Akar Krisis Semenanjung Krimea

Ketegangan antara Ukraina dan Rusia mengenai Semenanjung Krimea, khususnya Kota Pelabuhan Sevastopol, sesungguhnya telah berakar sejak pembubaran Uni Soviet, 26 Desember 1991, bahkan, dapat dikemukakan bahwa proses disintegrasi Uni Soviet tersebut pada hakikatnya masih terus berlanjut dan tercermin dalam krisis yang berlangsung hingga saat ini. Ketika Ukraina, Rusia, serta banyak negara lain yang lahir dari lima belas republik bekas Uni Soviet berupaya membangun identitas nasional masing-masing serta mendefinisikan kembali hubungan antarnegaranya, mereka juga dihadapkan pada berbagai sengketa wilayah yang kompleks.

Persoalan mengenai *"kemerdekaan"* Krimea dan perdebatan mengenai apakah wilayah tersebut merupakan bagian dari Ukraina atau Rusia telah menjadi inti pertentangan antara kedua negara yang baru terbentuk. Ketika Presiden Rusia (masa itu), Boris Yeltsin, mengetahui bahwa Parlemen Ukraina telah mendeklarasikan kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus 1991, ia secara drastis mengubah sikapnya terhadap republik-republik yang mengklaim kedaulatan. Yeltsin kemudian secara langsung memperingatkan pemerintah Ukraina bahwa apabila negara tersebut tetap memilih untuk memisahkan diri dari Uni Soviet dan menjadi negara yang merdeka, Rusia akan mengangkat kembali persoalan mengenai klaim-klaim teritorial yang berkaitan dengan wilayah Ukraina.

Meskipun Rusia secara resmi telah mengakui kemerdekaan Ukraina pada Desember 1991, Krimea tetap berupaya mendeklarasikan kemerdekaannya pada 5 Mei 1992 dengan menegaskan bahwa wilayah tersebut harus dipandang sebagai *"Negara Berdaulat Republik Krimea*" (“*a sovereign state of the Republic of Crimea”*) yang memiliki konstitusinya sendiri. Kondisi ini menempatkan Ukraina pada posisi yang serupa dengan Rusia, yaitu menghadapi persoalan mengenai bagaimana menyikapi bagian-bagian konstitutif negara yang baru terbentuk tetapi berupaya memisahkan diri dan mendeklarasikan kemerdekaan. Di Rusia sendiri, contoh yang paling menonjol adalah Chechnya dan Tatarstan, yang juga menuntut kemerdekaan pada tahun 1992. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pada Juni 1992 pemerintah Ukraina mengambil langkah tegas dengan membatasi keberlakuan Konstitusi Krimea**.** Kebijakan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa pemindahan Semenanjung Krimea dari Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1954 merupakan dasar hukum yang menegaskan bahwa Krimea adalah bagian dari wilayah Ukraina.

Sepanjang awal dekade 1990-an, hubungan antara Ukraina dan Rusia diwarnai oleh saling debat mengenai status Sevastopol dan Krimea. Presiden Ukraina (pada masa itu) Leonid Kravchuk, yang pada saat Deklarasi Kemerdekaan menjabat sebagai Ketua Parlemen Ukraina, menyebut berbagai upaya Rusia untuk mengambil kembali Semenanjung Krimea sebagai suatu *"penyakit imperial"* (“*imperial disease”*), yang mencerminkan ambisi Rusia untuk menghidupkan kembali pengaruh kekaisarannya.

Tahun 1993, Parlemen Rusia berupaya menetapkan Sevastopol *sebagai "kota Rusia" (*"Russian city"*).* Krimea, dan khususnya Sevastopol, sejak saat itu semakin menjadi fokus utama agenda politik kelompok-kelompok nasionalis dan neo-imperialis Rusia, yang memandang wilayah tersebut sebagai bagian integral dari Rusia, bukan Ukraina. Sevastopol, secara khusus, semakin menjadi fokus utama kelompok-kelompok neo-imperialis Rusia, yang memandang bahwa *"Kota Pahlawan" ("Hero City")* tersebut seharusnya menjadi bagian dari Rusia, bukan Ukraina. Sebutan *"Kota Pahlawan"* merupakan gelar kehormatan yang diberikan pada masa Uni Soviet kepada kota-kota yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan luar biasa selama Perang Dunia II, sehingga Sevastopol memiliki nilai historis dan simbolis yang sangat penting dalam memori kolektif masyarakat Rusia.

Pada Oktober 1999, hanya dua bulan setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia (masa itu), Vladimir Putin melakukan kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri dengan menghadiri Pertemuan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (Commonwealth of Independent States/CIS) di Yalta. Pada kesempatan yang sama, ia secara resmi meresmikan pembukaan Konsulat Rusia di Simferopol (sekitar 80 kilometer) dari Yalta. Konsulat tersebut segera diberikan mandat untuk mendistribusikan paspor Rusia kepada seluruh personel Armada Laut Hitam beserta anggota keluarga mereka. Di balik kebijakan tersebut terdapat tujuan politik yang jelas, yakni agar para penerima paspor Rusia memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan parlemen Rusia yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember tahun yang sama. Dalam kunjungan tersebut, Putin juga menegaskan bahwa sekitar 65 persen penduduk Krimea mengidentifikasi diri sebagai etnis Rusia, sementara 85 persen menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa sehari-hari. Pernyataan tersebut memperkuat narasi bahwa Krimea memiliki keterkaitan historis, budaya, dan demografis yang erat dengan Federasi Rusia (masa itu).

Persaingan antara Rusia dan Ukraina mengenai status Krimea semakin meningkat setelah terjadinya Revolusi Oranye (Orange Revolution) di Ukraina pada tahun 2004, yang mengantarkan Viktor Yushchenko menjadi presiden melalui pemerintahan yang secara terbuka berupaya melepaskan diri dari pengaruh politik Rusia dan memperkuat orientasi Ukraina ke arah Barat. Sejak saat itu, berbagai aktor dari Rusia—meliputi organisasi kepemudaan, kelompok paramiliter, Gereja Ortodoks Rusia, jaringan bisnis, hingga unsur-unsur kriminal—mulai melakukan berbagai aktivitas, baik secara terbuka maupun terselubung di Semenanjung Krimea, dengan tujuan membangun dukungan bagi penyatuan kembali wilayah tersebut dengan Rusia. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa upaya memengaruhi dinamika politik di Krimea tidak hanya dilakukan melalui jalur diplomatik atau kebijakan negara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-negara yang beroperasi secara terkoordinasi. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia kembali memuncak pada akhir tahun 2009, ketika Presiden Ukraina (masa itu), Viktor Yushchenko, memerintahkan Dinas Keamanan Federal Rusia (Federal Security Service/FSB) untuk menarik seluruh personelnya dari Armada Laut Hitam Rusia (Russian Black Sea Fleet).

Yushchenko juga menegaskan bahwa seandainya tidak terikat oleh Perjanjian Rusia–Ukraina yang ditandatangani pada tahun 1997 dengan masa berlaku dua puluh tahun, ia mungkin akan memerintahkan seluruh Armada Laut Hitam Rusia untuk meninggalkan wilayah Ukraina.

Dalam pemilihan umum Presiden Ukraina tahun 2010, Vladimir Putin memberikan dukungan kepada Viktor Yanukovych karena Yanukovych berkomitment untuk mendukung perpanjangan penggunaan Pangkalan Angkatan Laut Sevastopol oleh Rusia tanpa batas waktu. Dukungan tersebut mencerminkan pentingnya Sevastopol bagi kepentingan strategis dan keamanan nasional Rusia, khususnya dalam mempertahankan kehadiran militer serta pengaruh geopolitiknya di kawasan Laut Hitam. Namun demikian, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di Krimea sangat rentan apabila di Ukraina berkuasa suatu kekuatan politik yang bersikap tidak bersahabat terhadap kepentingan Rusia. Selama bertahun-tahun, para komandan Angkatan Laut Rusia juga secara terbuka menyatakan ketidakpuasan terhadap berbagai pembatasan yang diatur dalam perjanjian antara Rusia dan Ukraina mengenai Armada Laut Hitam Rusia. Perjanjian tersebut melarang Rusia melakukan modernisasi atau peningkatan terhadap kapal-kapal perang maupun pesawat udara yang ditempatkan dalam armada tersebut. Pembatasan ini dipandang menghambat kemampuan operasional dan pengembangan kekuatan militer Rusia di kawasan Laut Hitam.

Pemberontakan Maidan – Ukraina (Akhir tahun 2013 – Awal tahun 2014)

Pemberontakan Maidan terjadi pada akhir tahun **2013,** mempertemukan warga Ukraina dari berbagai latar belakang politik di Lapangan Maidan (Maidan Nezalezhnosti) di Kyiv untuk memprotes keputusan Presiden Viktor Yanukovych yang menolak menandatangani Perjanjian Asosiasi *("Association Agreement")* yang ditawarkan oleh Uni Eropa (European Union/EU). Selain itu, demonstrasi tersebut juga merupakan bentuk protes terhadap praktik korupsi dan tindakan represif yang terjadi di dalam negeri. Perjanjian Asosiasi tersebut memuat berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif antara Uni Eropa dan Ukraina, meliputi kerja sama di bidang hubungan ekonomi dan perdagangan bebas, kerja sama industri, langkah-langkah bertahap menuju pembebasan visa, pertukaran informasi—terutama di bidang hukum—akses terhadap Bank Investasi Eropa (European Investment Bank/EIB), serta modernisasi sektor energi Ukraina. Meskipun para demonstran menunjukkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Yanukovych dan mengekspresikannya secara terbuka melalui aksi unjuk rasa serta berbagai slogan protes, pada tahap awal mereka tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Yanukovych. Namun demikian, ketika pemerintah memutuskan untuk menggunakan kekerasan terhadap para demonstran, dinamika konflik berubah secara signifikan. Eskalasi tersebut meningkatkan intensitas krisis politik, sehingga gerakan protes berkembang menjadi jauh lebih keras dan secara terbuka menuntut berakhirnya pemerintahan Yanukovych.

Pada malam tanggal 21–22 Februari 2014, Presiden Viktor Yanukovych meninggalkan Ukraina, sementara aparat keamanan yang berada di bawah kendalinya secara efektif membubarkan diri. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam pernyataannya pada Oktober 2014 dan diulangi pada Maret 2015, menyatakan bahwa:

"pelarian Yanukovych merupakan peristiwa yang memicu apa yang secara umum dikenal sebagai aneksasi Rusia atas Krimea".

Meskipun penggulingan Yanukovych memang menimbulkan konsekuensi strategis bagi kepentingan Rusia, sebagian besar pengamat di negara-negara Barat berpendapat bahwa peristiwa tersebut tidak cukup menjelaskan alasan Rusia mengerahkan kekuatan militernya ke Krimea, menyelenggarakan referendum, dan selanjutnya menyatakan bahwa wilayah Krimea menjadi bagian dari Federasi Rusia (masa itu). Pembenaran yang dikemukakan Putin berpusat pada klaim perlindungan terhadap *"rekan senegara" ("sootechestvenniki")* Rusia. Namun demikian, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat etnis Rusia di Krimea mengalami ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan Maidan. Lebih lanjut, terdapat sejumlah indikasi bahwa persiapan Rusia untuk melakukan suatu tindakan di Krimea telah dimulai sejak awal berlangsungnya pemberontakan Maidan pada akhir November 2013. Sejak saat itu, media Rusia secara intensif menyiarkan berbagai program yang bersifat anti-Maidan dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat di Krimea dan wilayah timur Ukraina. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok pro-Rusia di Parlemen Krimea semakin gencar menyerukan agar Krimea memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Federasi Rusia (masa itu). Pada akhir Januari 2014, berbagai kelompok pro-Rusia di Krimea menyelenggarakan demonstrasi di sejumlah kota dengan membakar bendera Uni Eropa serta menyalahkan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO atas perkembangan krisis politik yang terjadi di Ukraina. Pada 4 Februari 2014, Parlemen Krimea mengumumkan rencananya untuk menyelenggarakan referendum mengenai *"status Krimea"* serta menyampaikan permohonan kepada Presiden Federasi Rusia (masa itu) agar memberikan perlindungan dan jaminan otonomi bagi wilayah Krimea. Rangkaian kontak yang berlangsung secara intensif antara para pejabat tinggi Rusia dan pemimpin politik Krimea menunjukkan adanya koordinasi politik yang semakin erat menjelang terjadinya perubahan status wilayah Krimea pada akhir Februari 2014.

Selanjutnya, angkatan bersenjata Rusia bergerak dengan sangat cepat memasuki wilayah Krimea melalui operasi yang terkoordinasi. Berbagai satuan militer dikerahkan, mulai dari infanteri angkatan laut, pasukan lintas udara, hingga pasukan operasi khusus. Personel militer tersebut didatangkan dari berbagai wilayah di Rusia dan diterjunkan ke Semenanjung Krimea secara terencana dan terkoordinasi. Sebelumnya, pada 24 Februari 2014, Presiden Vladimir Putin memerintahkan pelaksanaan latihan militer mendadak ("*snap military exercises"*) yang secara resmi dinyatakan berlangsung di distrik militer bagian barat dan tengah Rusia.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pengerahan kekuatan militer tersebut juga berperan dalam mendukung operasi Rusia di Krimea, yang berlangsung hanya beberapa hari setelah dimulainya latihan militer tersebut. Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah tersebut hampir dapat dipastikan merupakan strategi pengalihan perhatian (diversion). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tidak lama kemudian satuan-satuan pasukan lintas udara mulai dipindahkan dari Pskov menuju Rostov-on-Don di wilayah selatan Rusia sebagai titik persiapan ("*staging ground*") untuk pengiriman pesawat angkut dan helikopter transportasi menuju Krimea. Selain itu, kapal pendarat amfibi Syrian Express, yang sebelumnya beroperasi pada jalur pelayaran menuju Suriah, dialihkan ke Krimea untuk mengangkut sekitar 300 personel pasukan operasi khusus, termasuk satuan pasukan khusus baru yang pembentukannya diperintahkan oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2012, menuju ibu kota Krimea. Bersamaan dengan itu, berbagai pos pemeriksaan ("*roadblocks*") didirikan di sejumlah lokasi strategis, sementara helikopter angkut dan helikopter tempur diterbangkan dari Rostov-on-Don menuju Krimea. Di wilayah Kerch, Rusia juga memasang peralatan pengacau sinyal komunikasi *("jamming equipment")* sehingga pasukan Ukraina yang berada di Semenanjung Krimea tidak dapat menerima instruksi dari pemerintahan baru di Kyiv. Pada saat yang sama, pemerintahan Ukraina sendiri masih berada dalam kondisi yang belum stabil sebagai akibat dari pelarian Presiden Viktor Yanukovych. Akibatnya, hingga sekitar 30 Februari 2014, sebagian besar operasi militer utama Rusia di Semenanjung Krimea telah berhasil diselesaikan hampir tanpa terjadinya baku tembak.

Keberhasilan pengambilalihan Krimea yang berlangsung hampir tanpa pertumpahan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Pertama; kelompok-kelompok milisi pro-Rusia dan organisasi paramiliter lainnya mendirikan pos-pos pemeriksaan serta memberikan dukungan langsung terhadap operasi militer Rusia. Kehadiran mereka membuat kekuatan yang dihadapi pasukan Ukraina di Krimea menjadi jauh lebih besar dan sulit dilawan.

Kedua; angkatan bersenjata Rusia menunjukkan tingkat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan operasional yang tinggi. Kemampuan tersebut diduga merupakan hasil dari serangkaian latihan militer mendadak yang diperintahkan oleh Presiden Putin sepanjang tahun sebelumnya, sehingga meningkatkan kesiapan tempur pasukan Rusia dalam melaksanakan operasi secara cepat dan terkoordinasi.

Ketiga; meskipun pemerintah dan pasukan Ukraina telah memperkirakan kemungkinan munculnya gangguan dari kelompok-kelompok milisi pro-Rusia, mereka tidak mengantisipasi bahwa Rusia akan melancarkan invasi militer secara penuh. Kesalahan dalam memperkirakan skala ancaman tersebut menyebabkan pemerintah Ukraina tidak memiliki waktu maupun kapasitas yang memadai untuk melakukan respons secara efektif.

Keempat; berdasarkan perjanjian yang mengatur penempatan Armada Laut Hitam Rusia (Black Sea Fleet) di Sevastopol, Federasi Rusia secara sah diizinkan menempatkan hingga 25.000 personel militer, 132 kendaraan tempur lapis baja, serta 24 unit artileri di fasilitas-fasilitas militernya di wilayah Krimea. Keberadaan kekuatan militer Rusia yang telah ditempatkan secara legal berdasarkan Perjanjian tersebut memberikan keuntungan strategis yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan operasi pengambilalihan Krimea secara cepat dan efektif.

Krisis Krimea dan Ukraina juga dapat dipahami sebagai respons politik terhadap gelombang protes yang terjadi di Rusia pada 2011–2012 serta gerakan Maidan di Ukraina pada 2013. Rangkaian peristiwa tersebut mendorong para ahli strategi komunikasi politik Kremlin (*"Kremlin spin doctors"*) untuk membangun narasi baru yang menampilkan Presiden Putin sebagai sosok pemimpin yang heroik, sekaligus mengembangkan suatu landasan ideologis yang dipandang mampu merespons dan mengimbangi meningkatnya gerakan protes di dalam maupun di sekitar wilayah pengaruh Rusia.

Ukraina dan Kepentingan Geopolitik Rusia

Ukraina merupakan negara penyangga yang memiliki arti strategis yang sangat besar bagi Rusia. Tidak ada pemimpin Rusia yang akan mentoleransi keberadaan aliansi militer yang merupakan musuh utama Moskow untuk memperluas pengaruhnya ke Ukraina. Demikian pula, tidak ada pemimpin Rusia yang akan tinggal diam ketika Barat membantu membentuk pemerintahan di Ukraina yang bertekad mengintegrasikan negara tersebut ke dalam dunia Barat.

Negara-negara besar selalu sangat sensitif terhadap potensi ancaman yang muncul di dekat wilayah inti mereka. Alasan di balik aneksasi Krimea menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki arti penting bagi keamanan Rusia. Faktor geopolitik sebagai determinan utama dalam proses pengambilan keputusan Vladimir Putin. Bahkan jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi, Zbigniew Brzezinski (salah satu Penasihat Keamanan Nasional AS) telah menyatakan bahwa apabila Moskow kembali menguasai Ukraina, Rusia akan kembali menjadi sebuah negara imperium yang kuat. Menurut Brzezinski, penguasaan atas Ukraina merupakan elemen yang sangat penting bagi proyek *"great power policy"* Rusia karena negara tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis yang sangat strategis. Sejumlah akademisi dan tokoh politik lainnya juga mengemukakan pandangan serupa. Meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam argumentasi masing-masing, mereka pada umumnya sepakat bahwa aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 mencerminkan kepentingan geopolitik dan ekonomi Kremlin.

Terdapat tiga indikator utama mengkait kepentingan Geopolitik Rusia:

Indikator pertama; berkaitan dengan tingkat interdependensi ekonomi. Rusia merupakan pemasok utama hidrokarbon bagi hampir seluruh kawasan bekas Uni Soviet, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap minyak dan gas karena struktur industri dan kebutuhan energi rumah tangganya sangat bergantung pada kedua komoditas tersebut. Selain itu, komoditas energi Rusia juga memiliki arti penting bagi pasar Eropa (yang hingga awal tahun 2027 masih mengimpor sebagian besar kebutuhan gas alamnya dari Rusia). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hidrokarbon memiliki nilai strategis, baik bagi Rusia maupun bagi perekonomian global. Kremlin menyadari besarnya pengaruh Rusia dalam pasar energi internasional dan kerap memanfaatkan sumber daya energinya sebagai instrumen politik. Ancaman penghentian distribusi maupun kenaikan harga energi sering digunakan sebagai sarana untuk memberikan tekanan kepada negara lain agar menerima tuntutan politik Moskow. Oleh karena itu, mempertahankan posisi dominan dalam pasar energi menjadi sangat penting bagi pencapaian kepentingan nasional Rusia karena selain menjamin pendapatan yang diperlukan untuk mendukung modernisasi negara, dominasi tersebut juga meningkatkan daya tawar Rusia dalam hubungan internasional serta memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor utama dalam politik global. Dengan demikian, terdapat hubungan interdependensi ekonomi yang bersifat asimetris (tidak seimbang) antara Rusia dan negara-negara di kawasan *"Near Abroad",* terutama yang ditentukan oleh pasar hidrokarbon. Keberadaan jaringan pipa energi Rusia di wilayah negara lain meningkatkan kepentingan Moskow terhadap negara-negara tersebut karena infrastruktur tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi Rusia untuk menggunakan mekanisme tekanan ("*coercive mechanisms"*). Selain itu, keberadaan jaringan distribusi energi Rusia juga menunjukkan adanya hubungan saling bergantung ("*codependency"*) antara perekonomian Rusia dan negara-negara tujuan, sekaligus memperlihatkan kepentingan Moskow untuk mempertahankan serta mengendalikan infrastruktur strategis tersebut.

Indikator kedua; berkaitan dengan letak geografis**,** yang digunakan untuk menilai tingkat kepentingan geopolitik dan keamanan Ukraina serta Krimea bagi Rusia, difokuskan pada keberadaan sumber daya strategis, seperti pangkalan militer, akses terhadap wilayah yang memiliki nilai strategis, maupun berbagai keuntungan ekonomi dan militer yang muncul dari karakteristik geografis kedua wilayah tersebut.

Indikator ketiga; berkaitan dengan keberadaan perbatasan dengan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) dan/atau North Atlantic Treaty Organization (NATO)**.** Sejauh mana Ukraina dan Krimea dipandang rentan terhadap ekspansi pengaruh Barat, sekaligus menilai besarnya ancaman yang mungkin dihadapi Rusia apabila kedua wilayah tersebut berada di bawah pengaruh atau kendali Barat. Uni Eropa dan NATO dipandang sebagai dua instrumen utama kekuatan Barat di kawasan yang oleh Moskow dianggap sebagai lingkungan strategisnya.

Secara historis, Rusia memiliki sejumlah tujuan geopolitik yang berkaitan dengan kepentingan keamanan nasionalnya. Tujuan tersebut meliputi memperoleh akses ke *"perairan hangat" ("hot waters"***)**, yaitu akses bebas menuju laut lepas yang dapat digunakan sepanjang tahun; menghindari berbatasan langsung dengan negara-negara berkekuatan besar melalui keberadaan Zona Penyangga *("buffer zone");* mencegah penempatan rudal jarak menengah maupun jarak pendek di negara-negara tetangganya yang tergabung dalam NATO; serta menghalangi Ukraina dan Georgia menjadi anggota NATO.

Setelah pembubaran Uni Soviet, Rusia semakin menekankan kebijakan "*near abroad"*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memperoleh kembali pengaruh dan kendali atas wilayah-wilayah bekas Uni Soviet. Dalam perspektif ini, Rusia masih memandang negara-negara yang baru merdeka setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai bagian dari lingkungan strategisnya ("*backyard"*), sehingga tidak menghendaki adanya kekuatan eksternal yang membangun atau memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Berdasarkan perspektif tersebut, Rusia memandang ekspansi NATO ke arah timur sebagai salah satu ancaman geopolitik utama terhadap keamanan nasionalnya. Namun demikian, perkembangan politik dan militer di pihak NATO justru bergerak berlawanan dengan kepentingan yang diinginkan Rusia. Setelah berakhirnya Perang Dingin, muncul berbagai perdebatan mengenai masa depan NATO setelah Pakta Warsawa dibubarkan (hilangnya musuh utama menyebabkan eksistensi NATO sempat dipertanyakan). Meskipun demikian, NATO mampu beradaptasi dengan dinamika internasional yang baru, melalui perluasan definisi ancaman, tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional, tetapi juga mencakup ketidakpastian politik, konflik berkepanjangan ("*frozen conflicts"*), terorisme, keamanan energi, keamanan siber, serta isu migrasi. Di sisi lain, NATO juga memposisikan dirinya sebagai jaminan keamanan ("*security provider"*) bagi negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah pembubaran Uni Soviet.

Sebagai langkah awal, NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat membentuk *"North Atlantic Cooperation Council (NACC)"* sebagai wadah kerja sama yang diikuti oleh seluruh negara bekas anggota Pakta Warsawa. Selanjutnya, NATO menerapkan kebijakan ***"open door policy",*** yaitu kebijakan yang membuka peluang keanggotaan bagi negara-negara yang baru merdeka pasca runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1994, dalam KTT NATO di Brussel, diperkenalkan inisiatif baru yang dikenal sebagai *"Partnership for Peace (PfP)",* yang kemudian menggantikan peran NACC sebagai kerangka utama kerja sama antara NATO dan negara-negara mitranya. Implementasi kebijakan *"open door policy"* berlangsung melalui beberapa gelombang perluasan keanggotaan, terutama pada tahun 1999, 2004, dan 2009. Melalui proses tersebut, hampir seluruh negara di kawasan Eropa Timur bergabung menjadi anggota NATO, sehingga memperluas jangkauan aliansi tersebut hingga semakin mendekati perbatasan Rusia.

Pandangan Rusia Terhadap Perluasan NATO

Meskipun Rusia bergabung sebagai anggota North Atlantic Cooperation Council (NACC) dan kemudian Partnership for Peace (PfP), secara psikologis Rusia mengalami kesulitan menerima hilangnya statusnya sebagai negara adidaya setelah runtuhnya Uni Soviet. Oleh karena itu, Rusia terus berupaya memperoleh kedudukan yang setara dengan NATO. Upaya tersebut menghasilkan pembentukan NATO–Russia Founding Act pada tahun 1997 beserta Permanent Joint Council sebagai mekanisme konsultasi antara kedua pihak. Lima tahun kemudian, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Roma tahun 2002, mekanisme tersebut diubah menjadi NATO–Russia Council. Namun, setelah Rusia menduduki Semenanjung Krimea pada tahun 2014, kerja sama dalam NATO–Russia Council ditangguhkan dan hingga kini belum kembali berfungsi secara efektif.

Rusia secara konsisten menentang perluasan keanggotaan NATO dengan alasan bahwa Pakta Warsawa telah dibubarkan, sehingga menurut Rusia tidak lagi terdapat justifikasi bagi NATO untuk terus memperluas wilayah operasionalnya. Dari sudut pandang Rusia, ekspansi NATO menunjukkan bahwa aliansi tersebut masih memandang Rusia sebagai calon musuh potensial, meskipun negara-negara Barat menyatakan bahwa perluasan NATO tidak ditujukan untuk mengancam Rusia. Sebagai upaya untuk meredakan kekhawatiran tersebut, NATO memberikan status khusus kepada Rusia melalui pembentukan Permanent Joint Council di Brussel pada tahun 1997 berdasarkan NATO–Russia Founding Act. Selanjutnya, pada KTT Roma tahun 2002 dibentuk NATO–Russia Council sebagai forum dialog dan konsultasi yang lebih komprehensif. NATO–Russia Founding Act merupakan dokumen penting yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara NATO dan Rusia serta menjadi salah satu pilar dalam arsitektur keamanan Eropa.Meskipun demikian, dokumen tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Rusia untuk memveto proses perluasan keanggotaan NATO.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa setiap negara yang memenuhi persyaratan tetap memiliki hak untuk mengajukan keanggotaan NATO tanpa memerlukan persetujuan Rusia. Kendati demikian, Rusia menyetujui dan menandatangani NATO–Russia Founding Act dengan pemahaman bahwa NATO tidak akan berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Rusia. Namun, hubungan tersebut kembali memburuk setelah NATO menangguhkan aktivitas NATO–Russia Council sebagai respons terhadap tindakan Rusia di Ukraina pada tahun 2014. Bagi Rusia, perluasan NATO ke arah timur dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasionalnya. Dalam konteks ini, Ukraina dipersepsikan sebagai zona penyangga *("buffer zone")* yang memisahkan Rusia dari negara-negara Barat. Oleh karena itu, keputusan NATO pada KTT Bukares tahun 2008 yang menyatakan bahwa Ukraina dan Georgia berpotensi menjadi anggota NATO dipandang oleh Rusia sebagai ancaman serius terhadap kepentingan strategisnya.

Sejak dekade 1990-an, Rusia secara berulang kali menyatakan penolakannya terhadap kebijakan perluasan NATO. Menurut pandangan Rusia, negara-negara Barat secara bertahap telah memperluas pengaruhnya hingga memasuki kawasan yang selama ini dianggap sebagai lingkungan strategis Rusia ("*Russia's backyard*"), sehingga dinilai mengancam kepentingan keamanan inti negara tersebut. Rusia juga secara terbuka menyatakan bahwa kemungkinan bergabungnya Ukraina ke dalam NATO berpotensi memicu konflik langsung antara Rusia dan NATO di masa mendatang, terutama karena Rusia khawatir NATO akan melakukan intervensi apabila terjadi sengketa atau konflik bersenjata yang melibatkan Ukraina. Rusia beranggapan bahwa sengketa yang belum terselesaikan di Krimea dan Donbas sejak tahun 2014 akan menghalangi keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Asumsi tersebut didasarkan pada pengalaman Rusia di Georgia, di mana intervensi militer Rusia pada musim panas tahun 2008 dengan dalih melindungi wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan dari serangan Georgia berhasil menghambat aspirasi Georgia untuk menjadi anggota NATO. Sejak saat itu, peluang keanggotaan NATO bagi Georgia tertunda tanpa kepastian waktu.

Namun demikian, perkembangan di Ukraina menunjukkan hasil yang berbeda. Pasca krisis Ukraina tahun 2014, negara tersebut justru menjadi salah satu arena utama persaingan strategis antara Rusia dan negara-negara Barat. Aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO semakin menguat dan bahkan dimasukkan ke dalam konstitusi sebagai salah satu tujuan strategis negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rusia tidak berhasil menghalangi keinginan Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Di sisi lain, sejumlah akademisi berpendapat bahwa kombinasi kebijakan Barat yang meliputi perluasan NATO, ekspansi Uni Eropa, dan promosi demokrasi justru memperburuk ketegangan yang telah ada sebelumnya. Dari perspektif Rusia, kebijakan-kebijakan tersebut dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional, terutama karena dianggap berpotensi melemahkan stabilitas rezim politik Rusia yang bercorak otoritarian.

Hubungan NATO dan Amerika Serikat dengan Ukraina terus berkembang. Hubungan erat tersebut sesungguhnya telah terjalin sejak *"Revolusi Oranye (Orange Revolution)"* yang mengantarkan pemerintahan pro-Barat menggantikan kepemimpinan yang berorientasi pro-Rusia. Rusia kemudian memanfaatkan krisis politik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 sebagai dasar untuk menduduki Semenanjung Krimea serta mendukung destabilisasi di wilayah Donbas. Sejak saat itu, Ukraina menjadi garis depan utama dalam persaingan geopolitik antara Rusia dan Barat. Dalam perkembangannya, Rusia menuntut adanya jaminan keamanan yang bersifat konkret dari Amerika Serikat dan NATO bahwa Ukraina tidak akan diterima sebagai anggota NATO. Selain itu, Rusia juga menuntut agar tidak ditempatkan kekuatan militer maupun infrastruktur militer NATO di wilayah Ukraina. Sebagai tindak lanjut dari tuntutan tersebut, pada 17 Desember 2021 Rusia mengajukan rancangan perjanjian keamanan baru kepada Amerika Serikat dan NATO. Dalam rancangan tersebut Rusia menuntut agar NATO tidak menempatkan pasukan maupun sistem persenjataan di negara-negara yang bergabung dengan NATO.

Apabila ditinjau dari kebijakan NATO sebelumnya, sejak tahun 1997 hingga 2014 aliansi tersebut pada praktiknya memang tidak menempatkan pasukan tempur dalam jumlah signifikan maupun peralatan militer permanen di negara-negara anggota baru yang sebelumnya merupakan anggota Pakta Warsawa atau bagian dari bekas Uni Soviet. Demikian pula dalam kebijakan nuklirnya, NATO secara konsisten menyatakan bahwa organisasi tersebut *"tidak memiliki niat, rencana, maupun alasan"* untuk menempatkan senjata nuklir di wilayah negara-negara anggota baru. Kebijakan tersebut baru mengalami perubahan setelah aneksasi Krimea dan agresi Rusia di Ukraina Timur pada tahun 2014. Melalui tuntutan tersebut, Rusia pada dasarnya berupaya mengembalikan struktur keamanan dan politik Eropa seperti sebelum tahun 1997, sekaligus menghentikan proses perluasan NATO agar Ukraina dan Georgia tidak menjadi anggota aliansi tersebut. Rusia juga berpendapat bahwa perluasan NATO ke Eropa Timur merupakan pelanggaran terhadap jaminan politik yang pernah disampaikan oleh James Baker, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat masa itu, kepada pemimpin Uni Soviet Mikhail S. Gorbachev pada masa proses reunifikasi Jerman. Menurut pandangan Rusia, ekspansi NATO ke arah timur merupakan tindakan sepihak yang mengancam kepentingan keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, Rusia menginginkan adanya perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara Barat mengenai pembatasan perluasan NATO. Selain itu, Rusia juga mengusulkan pembentukan kembali jalur komunikasi langsung dengan NATO melalui pengaktifan kembali NATO–Russia Council dalam rancangan perjanjian tersebut. Pada prinsipnya NATO menyatakan kesediaannya untuk mempertahankan saluran dialog, termasuk melalui penyelenggaraan kembali pertemuan NATO–Russia Council, meskipun hubungan resmi antara kedua pihak telah ditangguhkan oleh Rusia sejak Oktober 2021. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa Rusia telah memperkirakan sejak awal bahwa rancangan perjanjian tersebut akan ditolak oleh Amerika Serikat dan NATO. Penolakan tersebut kemudian berpotensi dijadikan alasan tambahan untuk membenarkan tindakan militer terhadap Ukraina.

Hal ini disebabkan karena sejumlah ketentuan dalam rancangan perjanjian dinilai tidak lazim dalam praktik hubungan internasional, bersifat sepihak, serta memuat tuntutan yang sulit diterima oleh negara-negara Barat. Setelah dipublikasikan oleh pemerintah Rusia, isi rancangan tersebut memang mendapat penolakan dari Amerika Serikat dan NATO. Amerika Serikat dan NATO menolak tuntutan Rusia karena dianggap sebagai upaya sepihak untuk membatasi mekanisme pengambilan keputusan serta kebijakan internal NATO. Meskipun NATO tetap mempertahankan "*open door policy"* dan menjalin kerja sama erat dengan Ukraina maupun Georgia, dalam praktiknya aliansi tersebut tidak menunjukkan indikasi akan memberikan keanggotaan kepada kedua negara tersebut dalam waktu dekat, dengan mempertimbangkan realitas geopolitik ("*realpolitik"*) kawasan. Walaupun demikian, sejak tahun 2014 Ukraina memperoleh dukungan ekonomi dan bantuan militer yang sangat besar dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO. Negara-negara Barat berupaya menghindari terulangnya kegagalan mereka dalam merespons tindakan Rusia di Georgia pada tahun 2008 maupun di Krimea dan Ukraina Timur pada tahun 2014. Oleh karena itu, mereka secara kolektif meningkatkan kapasitas pertahanan Ukraina melalui bantuan persenjataan, pelatihan militer, serta penguatan kemampuan pertahanan negara tersebut.

Pada awal invasi Rusia tahun 2022, banyak pihak memperkirakan bahwa perang akan berlangsung singkat karena Ukraina dianggap tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti terhadap kekuatan militer Rusia. Namun kenyataannya, pemerintah, angkatan bersenjata, dan masyarakat Ukraina menunjukkan tingkat ketahanan dan tekad yang sangat tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Kemampuan tersebut tidak terlepas dari dukungan militer yang signifikan dari negara-negara Barat yang telah meningkatkan kesiapan tempur Ukraina sebelum invasi berlangsung. Pada November 2021 Amerika Serikat dan Ukraina menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang semakin memperkuat hubungan keamanan kedua negara. Perjanjian tersebut dipandang oleh Rusia sebagai perkembangan yang semakin mengancam keamanan nasionalnya. Berbagai bentuk bantuan militer Amerika Serikat kepada Ukraina, termasuk pelatihan personel militer serta modernisasi infrastruktur pertahanan Ukraina, semakin memperkuat persepsi Rusia bahwa kepentingan strategisnya sedang terancam. Secara keseluruhan, Rusia memandang Ukraina sebagai bagian dari lingkungan pengaruh strategisnya *("sphere of influence"*)**.** Oleh karena itu, kemungkinan bergabungnya Ukraina ke dalam NATO maupun Uni Eropa dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Rusia yang berpotensi memicu konfrontasi langsung dengan NATO. Dengan demikian, isu keanggotaan Ukraina dalam NATO menjadi salah satu kepentingan geopolitik utama Rusia sekaligus faktor penting yang melatarbelakangi meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat.

Penutup

Konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Konfrontasi antara kedua negara pada dasarnya telah dimulai sejak terbentuknya Kekaisaran Moskow.

Selama periode tersebut, Rusia dinilai berupaya mencaplok wilayah-wilayah Ukraina, melakukan proses Russifikasi, serta melemahkan identitas nasional dan identitas budaya Ukraina. Selain itu, masyarakat kedua negara memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar. Oleh karena itu, konflik Rusia–Ukraina dipandang sebagai konflik peradaban ("*civilizational conflict"*) yang berakar pada perbedaan budaya, etnis, sejarah, politik, dan geopolitik yang mendalam antara kedua negara. Di satu sisi, Ukraina dipengaruhi oleh budaya Eropa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan. Nilai-nilai tersebut dipandang bertolak belakang dengan model politik Rusia yang secara tradisional bercorak otoritarian. Di sisi lain, Rusia berupaya menegaskan kembali pengaruhnya terhadap negara-negara bekas republik Uni Soviet, termasuk Ukraina, serta mempertahankan kekuatan geopolitiknya di kawasan.

Aneksasi Krimea menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi Rusia. Sebagai akibat dari sanksi ekonomi yang berat, Rusia mengalami berbagai dampak negatif, termasuk penurunan produk domestik bruto (PDB) sekitar 8%. Selain itu, Rusia dikeluarkan dari kelompok G-8 sehingga forum tersebut kembali ke konfigurasi awalnya sebagai G-7 sebagaimana pada dekade 1970-an. Namun demikian, apabila mempertimbangkan bahwa Kremlin tidak pernah membatalkan aneksasi tersebut, bahkan kembali menunjukkan ambisi ekspansionisnya di Ukraina, maka peristiwa tahun 2014 tampaknya memberikan keuntungan tertentu bagi Rusia.

Aneksasi Krimea merupakan hasil dari tumpang-tindih dua faktor utama:

Faktor pertama; berkaitan dengan kepentingan material Moskow terhadap Krimea dan Ukraina. Pencarian keuntungan ekonomi dan militer menjadi dasar utama di balik keputusan Rusia untuk melakukan aneksasi.

Keuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sumber daya yang tersedia di kedua wilayah tersebut, tetapi juga dengan posisi geografisnya yang strategis di tengah perluasan pengaruh Barat ke kawasan Eurasia, terutama melalui ekspansi Uni Eropa dan North Atlantic Treaty Organization (NATO)**.**

Faktor kedua; berkaitan dengan kedekatan identitas antara Rusia, Ukraina, dan Krimea serta perannya dalam proyek nasionalisme Rusia. Dalam konteks ini, ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik fundamental yang sejalan dengan ideologi politik yang saat ini menjadi dasar pembentukan identitas Kremlin dalam proyek kebijakan negara besar ("*great power policy"*). Kondisi tersebut menjadikan Krimea sebagai wilayah yang relatif mudah diintegrasikan ke dalam wilayah Rusia sekaligus menjadi wilayah yang penting dalam narasi ideologis Rusia.

Kebijakan *"great power"* Vladimir Putin dibentuk oleh suatu proyek nasionalisme yang bertumpu pada gagasan eksepsionalisme *("exceptionalism").* Gagasan tersebut secara bersamaan: 1. Membangun kebutuhan ideologis dan material untuk mengembalikan

Krimea ke dalam wilayah Rusia; 2. Menyediakan landasan ideologis yang digunakan untuk melegitimasi aneksasi Krimea. Meskipun konflik Rusia–Ukraina telah lama diperkirakan akan terjadi, kemunculannya di panggung internasional tetap berlangsung secara tiba-tiba dan nyaris tanpa peringatan. Uni Eropa mungkin telah mengambil risiko dengan menawarkan Perjanjian Asosiasi *("Association Agreement")* kepada Ukraina. Vladimir Putin jelas memahami tantangan yang ditimbulkan oleh Perjanjian Asosiasi tersebut, tetapi keberatannya pada awalnya lebih banyak disampaikan dalam konteks ekonomi daripada militer. Situasi tersebut baru mengalami perubahan ketika Presiden Viktor Yanukovych menyadari pada 21 Februari 2014 bahwa aparat keamanannya telah meninggalkannya, ia memutuskan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Kremlin menyadari bahwa mereka kembali menghadapi sebuah *"revolusi berwarna" ("color revolution"),* sehingga menurut pandangan Rusia diperlukan respons yang cepat dan segera.

Kehilangan Ukraina telah menjadi sumber kegelisahan intelektual yang mendalam bagi Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Rusia dan Uni Eropa memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep kedaulatan negara**,** sehingga perbedaan tersebut secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya konfrontasi. Meskipun demikian, perang di Ukraina bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Krisis tersebut merupakan konsekuensi dari serangkaian keputusan politik yang diambil oleh para aktor terkait, yang pada akhirnya bermuara pada revolusi, aneksasi, dan perang. Selama berlangsungnya krisis Ukraina, Putin secara konsisten mengambil kebijakan yang justru memperburuk hubungan dengan mitra dagang tradisional Rusia sekaligus mengurangi prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa masyarakat Rusia bersedia menanggung konsekuensi ekonomi demi mempertahankan status negaranya sebagai *"kekuatan besar"***.**

Ketika kembali menjabat sebagai Presiden Rusia pada tahun 2012, Putin menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki citra politiknya. Penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014 serta upaya memperkuat integrasi Rusia dengan komunitas internasional tidak berhasil mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, Putin dengan cepat mengubah arah kebijakannya dan memanfaatkan isu Krimea sebagai instrumen untuk memulihkan popularitasnya sekaligus memperkuat posisi dominannya dalam hierarki politik Rusia.

Rusia tidak hanya menerapkan kebijakan agresif terhadap Ukraina, tetapi juga terhadap negara-negara lain dalam hubungan internasional, sehingga tindakannya mendapat kecaman dari masyarakat internasional. Sejumlah negara secara terbuka memberikan dukungan kepada negara-negara yang terdampak, sementara negara lain menyatakan keprihatinan dan mengecam tindakan Rusia. Salah satu langkah awal yang diambil masyarakat internasional adalah pengesahan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai "*Territorial Integrity of Ukraine"*, yang menyerukan agar seluruh negara mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk prinsip nonintervensi dan penghormatan terhadap integritas wilayah.

Invasi Rusia merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional serta merupakan bentuk eskalasi yang sangat signifikan dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina dan negara-negara Barat, maupun dalam perang saudara di Donbas. Konflik tersebut berkembang setelah penggulingan pemerintahan pro-Rusia di Ukraina yang didukung oleh Barat melalui tindakan kekerasan dan dinilai tidak sah, dengan keterlibatan unsur oligarki dan kelompok kanan-jauh *("far-right"*) dalam oposisi Maidan. Peristiwa tersebut berlangsung melalui Tragedi Pembantaian Maidan (*Maidan Massacre*) dan upaya pembunuhan terhadap Presiden Viktor Yanukovych pada tahun 2014. Sebagai konsekuensinya, Ukraina berkembang menjadi negara sekutu dekat Amerika Serikat ("*US client state"*), menjadikan keanggotaan dalam NATO sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri yang bahkan diakomodasi dalam konstitusinya, serta semakin dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO lainnya sebagai benteng strategis ("*bulwark"*) untuk membendung pengaruh Rusia. Pembantaian Maidan dan penggulingan pemerintahan secara paksa selama gerakan Euromaidan memainkan peranan penting dalam memicu spiral konflik yang kemudian meningkat menjadi aneksasi Krimea oleh Rusia, perang saudara beserta intervensi militer Rusia di Donbas, hingga akhirnya berkembang menjadi perang Rusia–Ukraina.

Presiden Volodymyr Zelenskyy membatalkan janji kampanyenya untuk menyelesaikan konflik Donbas secara damai, tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Minsk yang berkaitan dengan penyelesaian damai konflik tersebut, serta menyatakan niatnya untuk mengembalikan wilayah Donbas yang dikuasai kelompok separatis dan Krimea yang telah dianeksasi Rusia ke bawah kendali pemerintah pusat sebelum invasi Rusia dimulai. Berbeda dengan klaim pemerintah dan media Rusia yang menyatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina bertujuan menghentikan tindakan genosida terhadap etnis Rusia atau masyarakat berbahasa Rusia, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan terjadinya genosida semacam itu di Ukraina, termasuk di wilayah Donbas. Selain itu, meskipun Zelenskyy dalam Konferensi Keamanan München (Jerman) yang diselenggarakan sesaat sebelum invasi Rusia mengisyaratkan bahwa Ukraina mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadi negara berkekuatan nuklir, pada saat itu tidak terdapat prospek nyata dalam waktu dekat bahwa Ukraina akan mengembangkan senjata nuklir maupun senjata biologis.

Kesimpulan

Berbagai analisis tentang krisis di Krimea dan Ukraina pada umumnya menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai sifat tindakan Rusia dalam mengambil alih Krimea dan melakukan intervensi di Ukraina. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan pertanyaan apakah tindakan tersebut merupakan respons taktis yang bersifat spontan dan improvisatif dari kepemimpinan Rusia, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Vladimir Putin, atau justru merupakan bagian dari strategi Jangka Panjang untuk memperkuat pengaruh dan mengendalikan kawasan yang dalam literatur kebijakan luar negeri sering disebut sebagai *"lingkungan sekitar Rusia" ("Russian neighborhood")*.

Sebagian kalangan memandang bahwa tindakan Rusia merupakan respons yang rasional terhadap apa yang dianggap sebagai ekspansi berulang ke wilayah kepentingannya melalui perluasan keanggotaan NATO dan Uni Eropa, dan menilai bahwa kebijakan Rusia merupakan bentuk irredentisme yaitu upaya untuk memperoleh kembali wilayah yang dianggap memiliki keterkaitan historis atau etnis dengan negara tersebut. Dalam perspektif ini, tindakan Rusia dipandang sebagai kebijakan yang tidak rasional dan berpotensi membahayakan stabilitas kawasan karena berorientasi pada pemulihan ruang geopolitik bekas Uni Soviet, bahkan dalam konteks tertentu dikaitkan dengan ambisi menghidupkan kembali pengaruh Kekaisaran Rusia pada masa Tsar.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan Rusia di Krimea dan Ukraina kemungkinan merupakan perpaduan antara pertimbangan rasional dan irasional, sekaligus mencerminkan kombinasi kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, tindakan Rusia tidak dapat diklasifikasikan secara sederhana sebagai tindakan yang sepenuhnya dapat dibenarkan ataupun sepenuhnya tidak dapat dibenarkan, demikian pula tidak dapat dipisahkan secara tegas ke dalam kategori kebijakan yang dapat diterima atau semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik yang bersifat oportunistis (“*Machiavellian”*). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap krisis Krimea dan Ukraina hanya dapat dicapai melalui analisis yang cermat terhadap berbagai faktor historis, politik, hukum, keamanan, dan geopolitik yang saling berkaitan. Pendekatan pluralistis diperlukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan secara lebih mendalam, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat.

“Pada akhirnya, krisis di Krimea dan Ukraina memperlihatkan karakteristik sebagai suatu konflik yang dibentuk oleh beragam justifikasi, kepentingan, dan faktor penyebab yang saling bertumpang tindih. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik secara menyeluruh akan menghadapi tantangan yang sangat besar, sehingga kecil kemungkinan krisis ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat”.

Jakarta, 19 Juli 2026

Referensi:

1. Roots of Rusia's War In Ukraine, Elisabeth A. Wood, Columbia University Press, 2016
2. Rusia War in Ukraine: Misleading Doctrine and Misguided Strategy, Dr. Pavel K. Baev, October 2022
3. The 2022 Rusia – Ukraine War: Reasons and Impact, Rusya-Ukrayna, May 2022
4. The War Between Ukraine and Rusia As A Historical and Civilization Aspect, Olena Pavlova et.al, Trames 2023
5. Encyclopedia Britannica, The Crisis of Crimea and Eastern Uraine, July 16, 2026
6. The Origin of the Rusia-Ukraine War, Rethingking Political Violence, Ivan Katchanovski, 2026
7. Russo – Ukrainian War, Ukrainian Research Institute, Harvard University, 2026
8. Conflict in Ukraine: A Timeline (Current Conflict, 2022 – Present), Nigel Walker, House of Common Library, June 29, 2026